

# FAKTOR-FAKTOR PENENTU KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN PERILAKU TIDAK ETIS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

**Yulius Sandityas**  
*js\_crut@yahoo.com*  
**Sutjipto Ngumar**  
**Ikhsan Budi Riharjo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and test the influence of information asymmetry, internal control and compliance with accounting rules against accounting fraud moderated unethical behavior. Populations in this study include Financial Administration Officials-Regional Device Work Units (PPK-SKPD) and Regional Finance Officials (PPKD) within the city of Kediri. In this study, based on purposive sampling criteria obtained 138 employees. Data collection techniques in this study using questionnaires. The type of data used in this study is primary data collected through sending questionnaires to respondents. The research method is quantitative, while the analysis technique using Moderating Regresion Analysis (MRA). The results of this study indicate that information asymmetry has a positive influence, while internal control and compliance with accounting rules have a negative effect, while unethical behavioral variables as moderating factors can strengthen the influence between information asymmetry and accounting fraud, and can weaken the influence of internal control on accounting fraud as well as weakening the influence of compliance with accounting rules against accounting fraud.*

*Keywords: information asymmetry, internal control, compliance with accounting rules, unethical behavior, accounting fraud*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh asimetri informasi, pengendalian intern dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi yang dimoderasi perilaku tidak etis. Populasi dalam penelitian ini meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dilingkungan kota Kediri. Dalam penelitian ini, berdasarkan kriteria *purposive sampling* diperoleh 138 pegawai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Metode penelitian yaitu kuantitatif, sedangkan teknik analisis menggunakan *Moderating Regresion Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh yang positif, sedangkan pengendalian intern dan ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruh yang negatif, sementara variabel perilaku tidak etis sebagai faktor pemoderasi dapat memperkuat pengaruh antara asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi, dan dapat memperlemah pengaruh pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi serta memperlemah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

Kata kunci: asimetri informasi, pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis, kecurangan akuntansi

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian

isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek *fraud* yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia telah terjadi secara berulang-ulang, baik itu pada sektor swasta maupun sektor publik. Media massa banyak memberitakan hal tersebut sehingga bagi masyarakat kasus kecurangan akuntansi seperti ini sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2004).

Menurut Messier *et al.*, (2006:104), kecurangan akuntansi merupakan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Di berbagai negara telah berkembang kecurangan akuntansi pada laporan keuangan termasuk Indonesia. Menurut Wilopo (2006), bentuk tindakan kecurangan akuntansi antara lain memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Pertanggungjawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Jika dalam laporan keuangan mengandung *fraud*, maka pemerintah di nilai tidak memenuhi fungsi utamanya berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satu bentuk dari kecurangan akuntansi adalah kebocoran anggaran. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Tuanakotta (2010), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa semakin besar *information asymmetry* akan memperbesar kesempatan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan. Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Kurniawan (2012) Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan yang dimiliki oleh agen dan *principal* yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak. Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Najahningrum (2013) dan Ardiana (2016), menyatakan asimetri informasi mempunyai hubungan yang positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut, dengan adanya asimetri informasi yang tinggi akan memperbesar kecenderungan kecurangan (*fraud*). Agar kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan

pengendalian internal. Pengendalian internal mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan untuk mengurangi adanya kecurangan. Pengendalian yang efektif akan menutup terjadinya kecurangan akuntansi. Dalam mewujudkannya sistem perusahaan yang baik dan tepat dibutuhkannya suatu analisa dan evaluasi, dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan. Sebuah pengendalian digunakan untuk membantu memantau kegiatan-kegiatan perusahaan. Najahningrum (2013); Wahono (2013) dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal mempunyai hubungan yang negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini yang berarti bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Mengingat pentingnya laporan keuangan suatu perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat sesuai aturan akuntansi yang berlaku. Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi (Widyaningrum dan Rahmawati, 2010). Kusumaastuti dan Meiranto (2012); Najahningrum (2013) dan Mustika dan Hastuti (2016), menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menyatakan bahwa lemahnya penegakan peraturan dalam suatu instansi, akan membuka peluang bagi pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan. Selain beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yang telah dipaparkan, perilaku tidak etis juga mempengaruhi banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Indonesia (Fauwzi, 2011). Prinsip etika suatu manajemen diwakili oleh perilaku manajemen, jika perilaku yang ditunjukkan oleh manajemen cenderung tidak etis maka dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Fauwzi (2011), menyatakan bahwa perilaku tidak etis berbeda dengan kecurangan akuntansi, pada kecurangan akuntansi lebih menekankan pada adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu, sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Sedangkan perilaku tidak etis merupakan perilaku seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan maupun jabatan untuk tujuan tertentu. Kusumastuti (2012), menyatakan bahwa perilaku tidak etis mempunyai pengaruh yang positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menyatakan bahwa perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi, contoh dari perilaku tidak etis yaitu dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kedudukan, dan sumberdaya perusahaan, mendorong manajemen melakukan kecurangan akuntansi.

Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi masih tinggi, tidak hanya pada entitas bisnis melainkan juga dapat terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, jenis kecurangan yang terjadi pada entitas pemerintahan yang berupa korupsi. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan data dari berita Jatim.com terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Kota Kediri yang menunjukkan nilai yang sangat berlawanan dengan data yang diungkap. Kasus yang terjadi di Pemerintahan Kota Kediri antara lain

kasus pembangunan jembatan Brawijaya yang didanai oleh APBN sebesar Rp. 66 Miliar, selain itu kasus normalisasi sungai yang didanai oleh APBD sebesar Rp 24 Miliar, serta korupsi dana kas daerah sebesar Rp 50 Miliar (Berita Jatim.com). Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi penanggung jawab penyusunan laporan keuangan pada pemerintah kota Kediri untuk mengetahui perilaku tidak etis serta kecenderungan kecurangan akuntansi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi, dan (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh hubungan asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel moderasi.

## TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dalam teori keagenan disebutkan bahwa terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada manajemen perusahaan (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Pembuatan keputusan oleh manajer perusahaan (*agent*) harus bisa diterima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya. Teori keagenan atau teori prinsipal-agen adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi dengan pihak penerima hak dan kewajiban, yang diikat dengan perjanjian atau kontrak. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), teori keagenan menjelaskan tentang hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Masalah keagenan akan muncul karena setiap individu mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi yang kemungkinan besar akan berlawanan dengan kepentingan individu lainnya. Untuk meminimalkan masalah keagenan yang muncul akibat perbedaan kepentingan ini maka dibuatlah kontrak antara prinsipal dan agen.

### Konsep Dasar Kecurangan Akuntansi

Kecurangan merupakan kesalahan disengaja yang dikelompokkan ke dalam dua tipe, (Jones, 1993) yaitu: (1) *fraudulent financial reporting*, yang meliputi: manipulasi, permalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung dan laporan keuangan yang disusun, tidak menyajikan dalam atau sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dan laporan keuangan, dan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah, (2) *misappropriation of asset*, yang meliputi penggelapan penerimaan kas, pencurian aktiva, dan hal-hal yang menyebabkan suatu entitas membayar untuk barang atau jasa yang tidak diterimanya. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* dalam Kurniawati (2012), *fraud* didefinisikan sebagai cakupan semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang dapat diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu. Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi

dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Wilopo (2006), menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.

### **Asimetri Informasi**

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Menurut Faramita (2011), manajer sebagai pengelola yang mengetahui informasi perusahaan terkadang tidak memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik. Sementara pemilik atau para pemegang saham mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan manajer karena tidak mempunyai kontak langsung dengan perusahaan, sehingga mereka tidak mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu kondisi dimana salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibanding pihak lainnya. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: (1) *Adverse selection*. (2) *Moral hazard*. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*). (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*). (3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*).

### **Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Winarno (2006: 11) menyatakan bahwa untuk mengurangi ancaman dan risiko terhadap sistem informasi akuntansi, diperlakukan suatu sistem pengendalian intern yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Tanpa sistem pengendalian intern, sistem akan mudah dirusak atau mudah digunakan orang lain yang tidak berhak, untuk menangani masalah kecurangan akuntansi, diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Krismiaji (2010:218), menyatakan bahwa rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. COSO (2013), sistem pengendalian intern memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses, sehingga tidak pernah berhenti bekerja. (2) Sangat dipengaruhi oleh orang dari berbagai tingkatan manajemen di dalam perusahaan. (3) Hanya dapat memberikan perlindungan secara *reasonable* (sewajarnya), karena harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian (*cost*

*and benefit*). (4) Ditujukan untuk melindungi tujuan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya terhadap laporan keuangan saja. (5) Memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda fungsinya namun saling terkait. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Di Indonesia sendiri perkembangan pengendalian internal khususnya pada entitas pemerintah ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam PP SPIP, sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan SPIP sendiri adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Kusumastuti (2012), sasaran pengendalian internal adalah: (1) Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien. (2) Laporan Keuangan yang handal/akuntabel. (3) Perlindungan aset. (4) Mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi. (5) Kesesuaian dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. (6) Membantu menentukan kebijakan manajerial

### **Ketaatan Aturan Akuntansi**

Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi. Pada entitas pemerintahan khususnya terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah, berdasarkan pada PP nomor 71 tahun 2010. Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas penegelolaan keuangan dan laporan keuangan yang efektif, handal serta akurat informasinya. Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): (1) Tanggung jawab penerapan. (2) Kepentingan public. (3) Integritas. (4) Obyektifitas. (5) Kehati-hatian. (6) Kerahasiaan. (7) Konsistensi. (8) Standar teknis.

### **Perilaku Tidak Etis**

Menurut Griffin dan Ebert (2006:58) pengertian “etika” merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Wilopo (2006) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Etika lebih banyak dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Hasbar (2007) menyebutkan bahwa etika birokrasi merupakan salah satu bentuk dari etika praktis (terapan) yang dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai-nilai yang

melekat dan menjadi acuan bagi setiap aparat birokrasi. Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan menjadi ukuran tentang baik atau buruk, wajar atau tidak wajar bahkan benar atau salah. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya. Fauwzi (2011), menjelaskan perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam perusahaan yaitu: (1) Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi (*abuse position*). (2) Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*). (3) Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*). (4) Perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*). Hesti (2012), menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis yaitu: (1) Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, perbedaan prinsip dan pendapat membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Ketika sekelompok orang beranggapan melakukan kecurangan adalah hal yang tidak wajar, sekelompok lain beranggapan sebagai hal yang wajar dilakukan. (2) Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis.

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan yang dimiliki oleh agen dan *principal* yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak (Kurniawan, 2012). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer sebagai pengelola yang mengetahui informasi perusahaan terkadang tidak memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik (Faramita, 2011). Dalam lingkup entitas pemerintahan, yang menjadi pihak pengguna informasi merupakan masyarakat. Karena pihak Dinas Pemerintah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat. Jika kondisi tersebut terjadi, maka akan membuka peluang bagi pihak yang mengelola keuangan untuk melakukan kecurangan. Pertanggungjawaban SKPD kepada masyarakat disajikan dalam bentuk laporan realisasi APBD. Jika masyarakat tidak mengetahui transaksi ekonomi apa saja yang mempengaruhi laporan tersebut secara detail, kemungkinan penyaji laporan akan memanipulasi laporan tersebut dengan tujuan kepentingan pribadi, misalnya agar kinerja nya terlihat baik. Wilopo (2006); Kusumaastuti dan Meiranto (2012); Najahningrum (2013), menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini yang berarti bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi pada suatu perusahaan terbuka maupun BUMN di Indonesia, maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan. Pengelola laporan keuangan tentu mengetahui laporan keuangan yang sebenarnya dikarenakan pengelola keuangan terlibat langsung dengan kegiatan organisasi, sementara pihak eksternal organisasi memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pengelola. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada entitas pemerintah, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi

#### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kusumaastuti (2012) menyatakan sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen cenderung melakukan tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Winarno (2006:11) menyatakan bahwa untuk mengurangi ancaman dan risiko terhadap sistem informasi akuntansi, diperlakukan suatu sistem pengendalian intern yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut, peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik, pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Wilopo (2006); Kusumaastuti dan Meiranto (2012); Ardiana (2016), menemukan bahwa pengendalian internal mempunyai hubungan yang negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini yang berarti bahwa semakin sesuai sistem pengendalian internal dengan tujuannya, semakin sederhana deteksi *fraud* yang perlu dilakukan. Artinya jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin kecil. Semakin efektif suatu pengendalian internal pada suatu entitas, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada entitas pemerintah, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi

### **Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Organisasi yang mengelola dana masyarakat, seharusnya organisasi sektor publik mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Proses pertanggungjawaban tersebut haruslah dilakukan secara transparan, karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan publik. Pada entitas pemerintahan khususnya terdapat pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah. Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas penegelolaan keuangan dan laporan keuangan yang efektif, handal serta akurat informasinya. Adelin (2013) dan Ardiana (2016), menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi mempunyai hubungan yang negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini yang berarti bahwa dalam suatu instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, penegakan peraturan kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, dengan salah satunya yaitu melakukan kecurangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada entitas pemerintah dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi

### **Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Etika yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi terwakili melalui perilaku yang dilakukan oleh orang atau organisasi tersebut. Apabila perilaku yang dilakukan cenderung



tidak etis maka orang atau organisasi tersebut juga akan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Hasbar (2007) menyebutkan bahwa aspek etika birokrasi pelayanan publik penting dalam praktik melaksanakan pemerintah yang bersih, utamanya konteks tindakan-tindakan penyelewengan birokrasi. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 2006). Tang dan Chiu, (2003) dalam penelitiannya menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam perusahaan. Wilopo (2006) dan Mustika dan Hastuti (2016), menunjukkan bahwa perilaku tidak etis mempunyai hubungan yang positif dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada entitas pemerintah dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi

#### **Perilaku Tidak Etis dalam Memediasi Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Faramita (2011), manajer sebagai pengelola yang mengetahui informasi perusahaan terkadang tidak memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik. Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham. Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta ratio-ratio keuangan perusahaan (Wilopo, 2006). Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perilaku tidak etis dalam memoderasi pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada entitas pemerintah dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Perilaku tidak etis memoderasi asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.

#### **Perilaku Tidak Etis dalam Memediasi Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Semakin banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang dikarenakan fungsi pengendalian internal yang kurang efektif ditambah dengan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh kepala daerah. Apabila tingkat perilaku tidak etis yang dilakukan rendah akan memperkuat tingkat keefektifan pengendalian internal dalam organisasi, sehingga dapat menurunkan

kesempatan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi dalam organisasi tersebut. Dalam teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab (Waworuntu, 2003). Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengendalian untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan yang tidak etis dan kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Adelin (2013), menemukan adanya hubungan yang positif antara perilaku tidak etis dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya prinsip etika tersebut menunjukkan sikap dari manajemen dalam mengelola perusahaan. Prinsip etika tersebut mewakili sikap manajemen dalam mengelola suatu perusahaan atau instansi. Jika perilaku yang ditunjukkan manajemen cenderung tidak etis maka kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perilaku tidak etis dalam memoderasi pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada entitas pemerintah dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Perilaku tidak etis memoderasi pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi

### **Perilaku Tidak Etis dalam Memediasi Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Aturan akuntansi dibuat agar tidak terjadi kesalahan dalam dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebuah organisasi. Seseorang dengan tingkat perilaku tidak etis yang rendah akan cenderung mentaati aturan-aturan akuntansi yang telah dibuat, sehingga kecil kemungkinan timbulnya kecurangan akuntansi dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi laporan keuangan adalah kekuatan pasar serta kekuatan regulasi (Wilopo 2006). Regulasi ini mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi kepada para pihak yang membutuhkan. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas penegelolaan keuangan dan laporan keuangan yang efektif, handal serta akurat informasinya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perilaku tidak etis dalam memoderasi pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada entitas pemerintah dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: Perilaku tidak etis memoderasi ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi

## **METODA PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek)**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang memerlukan perhitungan yang bersifat matematis. Model pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengujian parameter, dimana data-data dari hasil daftar pertanyaan yang dilakukan pada target populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2010:78), populasi adalah obyek yang akan diteliti yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang hendak diduga. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), dan Pegawai Bagian Akuntansi dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010) teknik *purposive sampling* yaitu suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Sampel dalam penelitian ini yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), dan Pegawai Bagian Akuntansi dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, yang merupakan sumber asli atau pertama (Sekaran, 2006:65). Data primer ini dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner pada responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden langsung dan ditujukan kepada responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), dan Pegawai Bagian Akuntansi dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner (angket).

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel Kecurangan Akuntansi (KKA)**

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang dikembangkan oleh Najahningrum (2013). Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai: (1) Kecurangan laporan keuangan. (2) Penyalahgunaan aset. (3) Korupsi

### **Asimetri Informasi (ASI)**

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang dikembangkan oleh Mustika dan Hastuti (2016). Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai: (1) Situasi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas *aktivitas* yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan. (2) Situasi di mana manajemen lebih mengenal *hubungan input-output* dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan. (3) Situasi di mana manajemen lebih mengetahui *potensi kinerja* yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan. (4) Situasi di mana manajemen lebih mengenal *teknis pekerjaan* yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan. (5) Situasi di mana manajemen lebih mengetahui *pengaruh faktor eksternal* dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan. (6) Situasi di mana manajemen lebih mengerti *apa yang dapat dicapai* dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan

### **Pengendalian Intern (PIN)**

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang dikembangkan oleh Wilopo (2006). Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai: (1)

Penerapan wewenang dan tanggung jawab. (2) Pencatatan transaksi. (3) Pengendalian fisik. (4) Sistem akuntansi. (5) Pemantauan dan evaluasi.

### **Ketaatan Aturan Akuntansi (KAK)**

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang dikembangkan oleh Wilopo (2006). Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai: (1) Tanggung jawab penerapan. (2) Kepentingan publik. (3) obyektivitas. (4) kerahasiaan. (5) Konsistensi. (6) Standar teknis.

### **Perilaku Tidak Etis (PTE)**

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang dikembangkan oleh Wilopo (2006). Instrumen pertanyaan tersebut antara lain mengenai: (1) Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (*abuse position*). (2) Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*). (3) Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*). (4) Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

### **Uji Validitas**

Menurut Santoso (2009: 68), bahwa validitas dalam penelitian di artikan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur peneliti tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada kemampuan atau tidak alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki. Jadi validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur oleh sebab itu alat ukur yang valid akan memiliki varians kesalahan yang rendah sehingga diharapkan alat tersebut akan di percaya, bahwa angka yang dihasilkan merupakan angka yang sebenarnya. Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika signifikansi dari  $r$  hitung atau  $r$  hasil  $> r$  tabel maka item variabel disimpulkan valid.

### **Uji Reliabilitas**

Reliabilitas dapat diartikan tentang sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan suatu hasil yang relatif sama, jika dilakukan pengukuran kembali pada subyek penelitian yang sama, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil di antara hasil beberapa kali pengukuran, atau dengan kata lain jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisiten dari waktu ke waktu. Umar (2009: 27), menyatakan bahwa reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *one shot method* atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $> 0,60$  (Ghozali, 2011:42).

### **Analisis Data**

Analisis regresi merupakan suatu metode statistika yang menjelaskan pola hubungan dua variabel atau lebih melalui sebuah persamaan. Tujuan permodelan regresi ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih serta untuk memprediksi atau meramalkan kondisi di masa yang akan datang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian antara dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah:

$$\text{KAK} = \alpha + \beta_1 \text{ASI} + \beta_2 \text{PIN} + \beta_3 \text{KAA} + \beta_4 \text{PTE} + \beta_5 \text{ASI} \cdot \text{PTE} + \beta_6 \text{PIN} \cdot \text{PTE} + \beta_7 \text{KAA} \cdot \text{PTE} + e$$

#### Keterangan

KAK : Kecurangan Akuntansi

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$  : Koefisien Regresi Variabel Bebas

ASI : Asimetri Informasi

PIN : Pengendalian Intern

KAA : Ketaatan Aturan Akuntansi

PTE : Perilaku Tidak Etis

e : Error

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel mengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011:49). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, salah satunya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik dari normal P - P *Plot of Regresion Standardized Residual*.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji model regresi ditemukan ada korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Menurut Santoso (2009:26), pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah: (1) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 10. (2) Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:69). Menurut Santoso (2009:21) deteksi adanya heterokedastisitas adalah deteksi dengan melihat ada tidaknya pada tertentu pada grafik. Dasar pengambilan keputusan: (1) Jika ada pola, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas. (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007:98) Pengujian menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi  $F > 0,05$  maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. (2) Jika nilai signifikansi  $F \leq 0,05$  maka model penelitian dapat dikatakan layak. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan; sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Kuncoro, 2007:100).

### Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2007: 97). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak. (2) Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  maka hipotesis diterima.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian di artikan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur peneliti tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada kemampuan atau tidak alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji validitas didapat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi adalah valid karena didapat nilai dari semua variabel memiliki nilai  $r$  Hitung  $>$  nilai  $r$  Tabel sebesar 0,159.

### Uji Reliabilitas

Mengukur reliabilitas dengan melihat *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $> 0,60$ . Hasil pengujian reliabilitas, dapat diketahui bahwa semua variabel yaitu variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi adalah *reliabel* karena memiliki nilai *cronbach alphanya* yang lebih besar dari 0,60.

### Analisis Data

Analisis regresi merupakan suatu metode statistika yang menjelaskan pola hubungan dua variabel atau lebih melalui sebuah persamaan. Tujuan permodelan regresi ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih serta untuk memprediksi atau meramalkan kondisi di masa yang akan datang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil analisis yang nampak pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Hasil Moderated Regression Analysis**

		Coefficients <sup>a</sup>		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	Model	B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.624	.474	
	ASI	.491	.136	.310
	PIN	-.358	.122	-.208
	KAA	-.437	.111	-.234
	PTE	.399	.111	.203
	ASI_PTE	.230	.044	.204
	PIN_PTE	-.316	.040	-.261
	KAA_PTE	-.482	.039	-.368

a. Dependent Variable: KAK

Sumber: Data Primer diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 1, didapat hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  

$$KAK = 0,624 + 0,491 \text{ ASI} - 0,358 \text{ PIN} - 0,437 \text{ KAA} + 0,399 \text{ PTE} + 0,230 \text{ ASI} \cdot \text{PTE} - 0,316 \text{ PIN} \cdot \text{PTE} - 0,482 \text{ KAA} \cdot \text{PTE}$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi yang didapat, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Koefisien Regresi Asimetri Informasi, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel asimetri informasi dengan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi pada suatu perusahaan terbuka maupun pemerintahan di Indonesia, maka semakin tinggi kecurangan akuntansi perusahaan. (2) Koefisien Regresi Pengendalian Internal, nilai koefisien regresi ini bersifat negatif yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel pengendalian internal dengan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut, peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi. (3) Koefisien Regresi Ketaatan Aturan Akuntansi, nilai koefisien regresi ini bersifat negatif yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel ketaatan aturan akuntansi dengan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang efektif, handal serta akurat informasinya. (4) Koefisien Regresi Perilaku Tidak Etis, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel perilaku tidak etis dengan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. (5) Koefisien Regresi Asimetri Informasi Interaksi Dengan Perilaku Tidak Etis, dari hasil interaksi, maka dapat diketahui pengaruh perilaku tidak etis dalam memoderasi dapat memperkuat pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi, nilai koefisien regresi ini bertanda positif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang searah antara variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. (6) Koefisien Regresi Pengendalian Internal Dengan Perilaku Tidak Etis, dari hasil interaksi, maka dapat diketahui pengaruh perilaku tidak etis dalam memoderasi dapat memperlemah pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi, nilai koefisien regresi ini bertanda negatif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang tidak searah antara variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. (7) Koefisien Regresi Ketaatan Aturan Akuntansi Interaksi Dengan Perilaku Tidak Etis, dari hasil interaksi, maka dapat diketahui pengaruh perilaku tidak etis dalam memoderasi dapat memperlemah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi, nilai koefisien regresi ini bertanda negatif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang tidak searah antara variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

### Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik. Hasil uji normalitas dengan

menggunakan Pendekatan Kolmogorov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 1,723 dan nilai *asympt. Signifikansi* sebesar 0.125 yang lebih besar dari 5% (0,05) maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji model regresi ditemukan ada korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi diantara variabel bebas. Berdasarkan nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 1, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis atau bisa disebut juga dengan bebas dari multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah deteksi dengan melihat ada tidaknya pada tertentu pada grafik. Dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y_{prediksi} - Y_{sesungguhnya}$ ) yang telah di standardized. Hasil pengujian heteroskedastisitas, didapat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

### Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel transparansi, tekanan eksternal dan komitmen manajemen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Hasil dari Uji Kelayakan Model, tampak pada Tabel 2.

Tabel 2					
Hasil Uji Kelayakan Model					
ANOVA <sup>b</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F Sig.
1	<i>Regression</i>	9.694	4	2.423	16.173 .000 <sup>a</sup>
	<i>Residual</i>	19.929	133	.150	
	<i>Total</i>	29.623	137		
a. Predictors: (Constant), PTE, PIN, ASI, KAA					
b. Dependent Variable: KAK					

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Hasil pengujian pada Tabel 2, didapat tingkat signifikan Uji Kelayakan Model = 0,000 < 0.05 (*level of signifikan*), yang menunjukkan pengaruh variabel asimetri informasi,



pengendalian internal, ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis model layak terhadap kecurangan akuntansi dan dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi yang nampak pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.572 <sup>a</sup>	.327	.307	.38710

a. Predictors: (Constant), PTE, PIN, ASI, KAA  
b. Dependent Variable: KAK

**Sumber: Data Primer diolah, 2017.**

Hasil pada Tabel 3, didapat *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,327 atau 32,7% yang menunjukkan kontribusi dari variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan sisanya 67,3% dikontribusi oleh faktor lain diluar model penelitian. Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara simultan antara variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis secara bersama-sama terhadap kecurangan akuntansi. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,572 atau 57,2% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis secara bersama-sama terhadap ketepatan kecurangan akuntansi memiliki hubungan yang cukup.

### **Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel asimetri informasi, pengendalian internal, ketataatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis secara individual dalam menerangkan variasi-variabel kecurangan akuntansi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 1, dapat diperoleh: (1) Pengujian pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, dengan demikian hipotesis pertama diterima. (2) Pengujian pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi, dengan demikian hipotesis kedua diterima. (3) Pengujian pengaruh ketataatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yang menyatakan bahwa ketataatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. (4) Pengujian pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, dengan demikian hipotesis keempat diterima.

## Pembahasan

### Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi

Hipotesis penelitian yang pertama menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006); Kusumaastuti dan Meiranto (2012); Najahningrum (2013), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi pada suatu perusahaan terbuka maupun BUMN di Indonesia, maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak, namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal. Pengelola laporan keuangan tentu mengetahui laporan keuangan yang sebenarnya dikarenakan pengelola keuangan terlibat langsung dengan kegiatan organisasi, sementara pihak eksternal organisasi memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pengelola. Manajer sebagai pengelola yang mengetahui informasi perusahaan terkadang tidak memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik (Faramita, 2011). Sementara pemilik atau para pemegang saham mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan manajer karena tidak mempunyai kontak langsung dengan perusahaan, sehingga mereka tidak mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan yang dimiliki oleh agen dan *principal* yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak (Kurniawan, 2012). Karena pihak Dinas Pemerintah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat. Jika kondisi tersebut terjadi, maka akan membuka peluang bagi pihak yang mengelola keuangan untuk melakukan kecurangan. Pertanggungjawaban SKPD kepada masyarakat disajikan dalam bentuk laporan realisasi APBD. Jika masyarakat tidak mengetahui transaksi ekonomi apa saja yang mempengaruhi laporan tersebut secara detail, kemungkinan penyaji laporan akan memanipulasi laporan tersebut dengan tujuan kepentingan pribadi, misalnya agar kinerja nya terlihat baik.

### Pengaruh Pengendalian Interan Terhadap Kecurangan Akuntansi

Hipotesis penelitian yang kedua menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa hipotesis kedua penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.028. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006); Kusumaastuti dan Meiranto (2012); Ardiana (2016), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa semakin efektif pengendalian internal diterapkan dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta maka semakin rendah kecurangan akuntansi yang terjadi, keefektifan pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Semakin sesuai sistem pengendalian internal dengan tujuannya, semakin sederhana deteksi *fraud* yang perlu dilakukan. Artinya jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin kecil. Semakin efektif suatu pengendalian internal pada suatu entitas, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Kusumaastuti (2012) menyatakan sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen cenderung melakukan tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh

pengendalian internal adalah adanya beberapa prosedur yang harus dilalui ketika akan melakukan transaksi seperti otorisasi dari pihak yang berwenang. Jika pengendalian tidak berjalan dengan baik, prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka akan membuka kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi untuk melakukan kecurangan. Keefektifan pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ini. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

### **Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Hipotesis penelitian yang ketiga menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa hipotesis ketiga penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.017. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2013), Ardiana (2016), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa dalam suatu instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, penegakan peraturan kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, dengan salah satunya yaitu melakukan kecurangan. Organisasi yang mengelola dana masyarakat, seharusnya organisasi sektor publik mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Proses pertanggungjawaban tersebut haruslah dilakukan secara transparan, karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan publik. Maka, semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk meminimalisir pelanggaran atas peraturan yang berlaku, maka harus ada penegakan peraturan yang tegas dalam lingkungan organisasi tersebut. Manajemen berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi laporan keuangan adalah kekuatan pasar serta kekuatan regulasi. Pada entitas pemerintahan khususnya terdapat pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah. Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas penegelolaan keuangan dan laporan keuangan yang efektif, handal serta akurat informasinya.

### **Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Hipotesis penelitian yang keempat menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa hipotesis keempat penelitian terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0.007. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Mustika dan Hastuti (2016), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Etika yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi terwakili melalui perilaku yang dilakukan oleh orang atau organisasi tersebut. Hasbar (2007) menyebutkan bahwa aspek etika birokrasi pelayanan publik penting dalam praktik melaksanakan pemerintah yang bersih, utamanya konteks tindakan-tindakan penyelewengan birokrasi. Etika lebih banyak dikaitkan dengan

prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 2006). Jika dalam suatu perusahaan kecurangan merupakan hal yang wajar atau biasa terjadi. Setiap orang dalam perusahaan tersebut akan cenderung melakukan kecurangan karena pegawai tersebut merasionalisasi tindakan tersebut sebagai tindakan yang biasa atau wajar terjadi. Dalam kondisi organisasi pemerintahan yang kebanyakan pegawai melakukan kecurangan dan hal tersebut dianggap wajar. Pegawai yang lain juga akan melakukan kecurangan dikarenakan pembenaran akan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam organisasi tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika dalam suatu instansi telah ditanamkan nilai-nilai bahwa suatu kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan.

### **Perilaku Tidak Etis dalam Memediasi Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi variabel asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi dapat memperkuat, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,230, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang searah antara variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Faramita (2011), manajer sebagai pengelola yang mengetahui informasi perusahaan terkadang tidak memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik. Sementara pemilik atau para pemegang saham mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan manajer karena tidak mempunyai kontak langsung dengan perusahaan, sehingga mereka tidak mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi. Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham. Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta ratio-ratio keuangan perusahaan (Wilopo, 2006).

### **Perilaku Tidak Etis dalam Memediasi Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi variabel pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi dapat memperlemah, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,316, nilai koefisien regresi ini bersifat negatif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang tidak searah antara variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. Prinsip etika suatu manajemen diwakili oleh perilaku manajemen

dalam pengelolaan perusahaan. Jika perilaku yang ditunjukkan oleh manajemen cenderung tidak etis maka dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Semakin banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang dikarenakan fungsi pengendalian internal yang kurang efektif ditambah dengan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh kepala daerah. Apabila tingkat perilaku tidak etis yang dilakukan rendah akan memperkuat tingkat keefektifan pengendalian internal dalam organisasi, sehingga dapat menurunkan kesempatan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi dalam organisasi tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku tidak etis dalam memoderasi Keefektifan Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada suatu perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi.

### **Perilaku Tidak Etis dalam Memediasi Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pengaruh perilaku tidak etis dalam memoderasi pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi dapat memperlemah, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,482, nilai koefisien regresi ini bersifat negatif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang tidak searah antara variabel perilaku tidak etis dalam memoderasi pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Moralitas manajemen yang tinggi juga didukung pada ketaatan aturan yang berlaku, manajemen berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku tidak etis dalam memoderasi ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi pada suatu perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Aturan akuntansi dibuat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebuah organisasi. Seseorang dengan tingkat perilaku tidak etis yang rendah akan cenderung mentaati aturan-aturan akuntansi yang telah dibuat, sehingga kecil kemungkinan timbulnya kecurangan akuntansi dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi laporan keuangan adalah kekuatan pasar serta kekuatan regulasi (Wilopo 2006). Regulasi ini mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi kepada para pihak yang membutuhkan. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas penegelolaan keuangan dan laporan keuangan yang efektif, handal serta akurat informasinya

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan uji kelayakan model diketahui bahwa

asimetri informasi, pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis model layak digunakan penelitian terhadap kecurangan akuntansi. (2) Asimetri informasi berpengaruh positif, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak, namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal. (3) Pengendalian intern berpengaruh negatif, hal ini berarti semakin efektif pengendalian internal diterapkan dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta maka semakin rendah kecurangan akuntansi yang terjadi, jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin kecil. (4) Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif, hal ini berarti penegakan peraturan yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, dengan salah satunya yaitu melakukan kecurangan, seharusnya organisasi sektor publik mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. (5) Perilaku tidak etis berpengaruh positif, hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. (6) Dari hasil analisis moderasi, perilaku tidak etis dapat memperkuat, hal ini menyatakan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan atau instansi kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta ratio-ratio keuangan perusahaan. (7) Dari hasil analisis moderasi, perilaku tidak etis dapat memperlemah, hal ini menyatakan bahwa prinsip etika suatu manajemen diwakili oleh perilaku manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Jika perilaku yang ditunjukkan oleh manajemen cenderung tidak etis maka dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Apabila tingkat perilaku tidak etis yang dilakukan rendah akan memperkuat tingkat keefektifan pengendalian internal dalam organisasi, sehingga dapat menurunkan kesempatan terjadinya kecurangan akuntansi dalam organisasi tersebut. (8) Dari hasil analisis moderasi, perilaku tidak etis dapat memperlemah, hal ini menyatakan bahwa moralitas manajemen yang tinggi juga didukung pada ketaatan aturan yang berlaku, manajemen berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Dengan kata lain, semakin tinggi perilaku tidak etis maka semakin tinggi pula tindakan kecurangan akuntansi, aturan akuntansi dibuat agar tidak terjadi kesalahan dalam dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebuah organisasi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Kota Kediri diharapkan untuk tetap mempertahankan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, karena digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. (2) Bagi Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan perputaran rotasi pegawai setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*), dan lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan dengan membuka ruang publik. sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami isi dari laporan keuangan tersebut. (3) Bagi Pemerintah Kota Kediri untuk mengeliminir perilaku tidak etis manajemen dan kecurangan akuntansi hendaknya dilakukan bila salah

satu unsur yang utamanya yaitu penanggung jawab penyusunan laporan keuangan taat pada aturan akuntansi, hal ini dapat dilakukan dengan transparansi dalam pengelolaan kegiatan usaha di pemerintahan. (4) Bagi pegawai Pemerintah Kota Kediri diharapkan untuk meningkatkan komitmen terhadap instansi. Memahami bahwa pegawai bekerja bukan hanya untuk kepentingan pribadinya tetapi juga untuk kepentingan publik atau masyarakat.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: (1) Keterbatasan dalam penelitian ini menunjukkan variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel ketepatan waktu sebesar 32,7%, berarti ada pengaruh sebesar 67,3% dari variabel-variabel lain diluar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini seperti variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, keadilan prosedural dan kesesuaian kompensasi. (2) Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, V. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumn Di Kota Padang. Jurnal. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Ali, I. 2002. Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintasan Ekonomi*. Vol. XIX. (2).
- Ardiana, W. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Dinas Kota Surakarta). Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- COSO. 2013. *Internal Control – Integrated Framework : Executive Summary*. Durham, North Carolina.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Eisenhardt, K. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*. 14.
- Faramita, D. 2011. Analisis Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kebijakan Deviden pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2002-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Faristina. R. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum (Studi pada Badan Layanan Umum di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fauwzi, M. G. H. 2011. Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP-Universitas Diponogoro. Semarang.
- Griffin, R. W. dan R. J. Ebert. 2006. *Binis*. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta.
- Hasbar, M. 2007. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Public. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*. Vol. 4 (3).

- Hesti, A. 2012. Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi Kasus PT Adi Satria Abadi Yogyakarta). *Jurnal Nominal*. 1(1).
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3: 305-360.
- Jones, P. 1993. *Combating Fraud and Corruption in The Public Sector*. Chapman & Hall. London.
- Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2007. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kurniawan, A. 2012. *Audit Internal, Nilai Tambah Bagi Organisasi*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Kurniawati, E. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Triangle (Maret). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kusumastuti, N. R. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kusumastuti, N. R. dan W. Meiranto. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*. Vol. 1(1).
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Andi Offset. Yogyakarta.
- Messier, W. F., S. M. Glover dan D. F. Prawitt. 2006. *Auditing & assurance services a systematic approach*. Edisi keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.
- Mustika, D. dan Hastuti. S. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.
- Najahningrum, A. F. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tentang *Penyajian Laporan Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Rahmawati, A. P. 2012. Analisis Faktor Internal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, S. 2009. *Statistik Multivariat*, Penerbit PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Scott, W. R., 2000. *Financial Accounting Theory* 3rd edition. Prentice Hall. Toronto.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. CV Alfabeta. Bandung.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE UGM. Jakarta.
- Tang, T. L. P. and R. K. Chiu, 2003. Income, Money Etic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46, pp: 13-20
- Tuanakotta, T. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. 2<sup>nd</sup> ed. Salemba Empat. Jakarta
- Umar, H. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Gramedia Pustaka. Jakarta.



- Wahono, M. E. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Fakultas Bisnis. Universitas Katolik Widya Mandala. Surabaya.
- Waworuntu, B. 2003. Determinan Kepemimpinan. *Makara Sosial Humaniora*. 7 (2).
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (STUDI EMPIRIS di Pemda Subosukawonosraten). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. 13-14 Oktober. Purwokerto.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Winarno, W. W. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua. STIE YKPN. Yogyakarta.